

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA	
Nama Pemda	: Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
Tahun Penilaian	: 2024
Periode yang dinilai	: RPD Tahun 2024 - 2026
Sumber Data	RPD, Renja, Laporan SAKIP, DPA
Tujuan Strategis RPD	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing - Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan - Terwujudnya Kesejahteraan dan Kerukunan Sosial yang Berasaskan Keberagaman - Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel
Sasaran RPD	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Masyarakat Terdidik dan Berkarakter - Meningkatkan Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat - Meningkatkan Daya Saing Masyarakat - Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif - Meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Daerah - Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota Secara Terpadu - Meningkatkan Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim - Meningkatkan Kualitas Perlindungan Sosial dan Daya Beli Masyarakat - Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan - Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Efisien - Meningkatkan Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas perlindungan sosial yang berpihak masyarakat rentan - Kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat - Peningkatan kualitas taraf kesehatan masyarakat - Percepatan reformasi tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja
IKU Sasaran RPD	Opini BPK
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial dan Daya Beli Masyarakat - Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan - Meningkatnya kualitas taraf kesehatan masyarakat - Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
Prioritas pembangunan dan program unggulan	;- meningkatnya kualitas pebgelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif dan akuntabel - optimalisasi pemanfaatan BMD
Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Nama Dinas Terkait	Dinsos P3AP2KB
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial - Terwujudnya Kesetaraan Gender - Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas - Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial, pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, Kerentanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial - Meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak - Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan - Meningkatkan pengendalian penduduk - Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
Nama OPD	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Tahun Penilaian	: 2024
Periode yang dinilai	: RPD Tahun 2024 - 2026
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan layanan perlindungan sosial yang terbatas	R. DinsoP3AP2KB01	DinsoP3AP2KB	Belum ada regulasi yang komprehensif dan lemahnya dukungan anggaran	Internal/eksternal	C	Masih adanya masyarakat yang belum mendapat perlindungan sosial	Pemerintah Kota Malang, Masyarakat	
2	Terwujudnya Kesenjangan Gender	IPG	Ketimpangan kesempatan dan hak gender	R. DinsoP3AP2KB02	DinsoP3AP2KB	Lemahnya cakupan program gender dan lemahnya dukungan anggaran	Internal	C	Ketimpangan gender	Pemerintah Kota Malang, Masyarakat	
3	Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas	Laju Pertumbuhan Penduduk	KIE yang tidak merata	R. DinsoP3AP2KB03	DinsoP3AP2KB	kurangnya penguatan KIE melalui media cetak dan elektronik	Internal	C	Kurang optimalnya laju pertumbuhan penduduk	Pemerintah Kota Malang, Masyarakat	

Menyetujui,
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana



DONNY SANDITO W, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat. I
NIP. 19770724 199802 1 001

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur		
Tahun Penilaian	: 2024		
Periode yang dinilai	: RPD Tahun 2024 - 2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintah di bidang Sosial, Pembedayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
OPD yang Dinilai	: Dinas Sosial Pembedayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Sumber Data	: Renstra, Renja, DPA		
Tujuan Strategis	- Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial - Terwujudnya Kesetaraan Gender - Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas		
Sasaran Strategis	- Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial, pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, Kerentanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial - Meningkatnya layanan perlindungan perempuan dan anak - Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan - Meningkatnya pengendalian penduduk - Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		
IKU Renstra OPD	IKU		
	2024		
	1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	14,81%
	2	IPG	95,34%
	3	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,14%
	4	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan akses perlindungan sosial, pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, Kerentanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial	4,75%
	5	Ratio KDRT	1:27.600
	6	IDG	77,64%
	7	TFR per WUS (15 s.d. 49 tahun)	2,55%
8	Nilai Sakip	89,90%	
Program	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
	3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
	5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
	6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
	7	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
	8	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
	9	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
	10	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
	11	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
	12	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
	13	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
	14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	

Menyetujui,
 Kepala Dinas Sosial Pembedayaan Perempuan
 Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga
 Berencana



DUNY SANDITO W, S.STP, M.Si
 Pembina Tingkat. I
 NIP. 19770724 199802 1 001



PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
Tahun Penilaian	: 2024
Periode yang dinilai	: RPD Tahun 2024 - 2026
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
OPD yang Dinilai	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sumber Data	: Renstra, Renja, DPA
Tujuan Strategis	- Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial
Program DinsosP3AP2KB (Renja 2024) dan Kegiatan Utama	<p>1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota</p> <p>a Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>c Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>d Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>e Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>f Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>g Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>h Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>2. Program Pemberdayaan Sosial</p> <p>a Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>b Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>3. Program Rehabilitasi Sosial</p> <p>a Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</p> <p>b Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</p> <p>4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</p> <p>a Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</p> <p>b Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>5. Program Penanganan Bencana</p> <p>a Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</p> <p>b Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</p> <p>a Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</p> <p>7. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>a Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>b Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>c Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>8. Program Perlindungan Perempuan</p> <p>a Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>b Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>9. Program Peningkatan Kualitas Keluarga</p> <p>a Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>b Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>10. Program Pemenuhan Hak Anak</p> <p>a Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>b Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>11. Program Perlindungan Khusus Anak</p> <p>a Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>b Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>12. Program Pengendalian Penduduk</p> <p>a Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</p> <p>b Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>13. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</p> <p>a Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</p> <p>b Peningkatan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</p> <p>c Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>d Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB</p> <p>14. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</p> <p>a Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>b Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p>
Keluaran/Hasil Kegiatan	<p>1a Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan</p> <p>1b Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu</p> <p>1c Persentase barang milik daerah yang terinventarisir</p> <p>1d Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian</p> <p>1e Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi</p> <p>1f Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD</p> <p>1g Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti</p> <p>1h Persentase barang milik daerah yang terpelihara</p> <p>2a Jumlah rekomendasi pengumpulan uang dan barang (PUB)</p> <p>2b Jumlah PSKS yang terfasilitasi</p> <p>3a Persentase (%) Pemerlu Pelayanan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</p> <p>3b Persentase (%) Pemerlu Pelayanan Sosial (PPKS) lainnya yang mendapatkan rehabilitasi sosial</p> <p>4a Jumlah anak terlantar yang terlayani</p> <p>4b Jumlah data fakir miskin yang tervalidasi</p> <p>5a Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial</p> <p>5b Persentase Tagana yang diberdayakan</p> <p>6a Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota</p> <p>7a Jumlah fokus point PUG</p> <p>7b Jumlah Dokumen</p> <p>7c Jumlah organisasi wanita yang terfasilitasi</p> <p>8a jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani</p> <p>8b Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan</p> <p>9a Jumlah ibu rumah tangga yang mendapatkan pelatihan</p>

9b	Jumlah layanan peningkatan kualitas keluarga	
10a	Jumlah lembaga Pemenuhan , non pemerintah dan dunia usaha yang mengikuti sosialisasi	
10b	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
11a	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi	
11b	Jumlah kasus korban kekerasan terhadap anak yang ditangani	
12a	Jumlah laporan	
12b	Jumlah dokumen	
13a	Jumlah Pelaksanaan dan pengendalian KIE	
13b	Jumlah PLKB yang aktif	
13c	Persentase alat dan obat kontrasepsi yang terfasilitasi	
13d	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Pemberdayaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat	
14a	Jumlah Laporan	
14b	Jumlah Organisasi yang aktif dan ikut dalam kegiatan	

Menyetujui,
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana



DANNY SANDITO W. S.STP. M.Si
Pembina Tingkat. I
NIP. 19770724 199802 1 001

No	Program / Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab		C/U/C	Dampak				Analisis Risiko					Urutan Pengendalian yang Sudah Ada (*)	Calah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Panangjawab	Target Waktu Penyelesaian	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
			Urutan	Kode Risiko	Pemilik	Urutan	Sumber		Urutan	Pihak yang Terkena	Skala Kemungkinan	Skala Dampak*	Skala Risiko	Keterangan Analisis Risiko	o	p	g												
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n																
				DAYASOS-03	Kabd Pemberdayaan Sosial	Keterbatasan anggaran	Eksternal/ internal	C	Tidak tercapainya target kerja instansi pemerintah	Dinas Sosial P3AP2KB, Lembaga Penerima Hibah					Monitoring dan evaluasi serta pendampingan hibah	Kondisi ekonomi tidak dapat diprediksi	Sosialisasi dan bimbingan teknis terkait hibah	Kepala Dinas Dinas Sosial P3AP2KB	9 Bulan		Pendampingan dan visitasi / peninjauan langsung ke lembaga	Dinas Sosial P3AP2KB, Bappeda, BKAD	Lembaga Penerima Hibah	Maret - Desember	Visitasi / kunjungan langsung	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	April - Desember 2024		
	Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten /																												
	Koordinasi dan sinkronisasi Penyerahan Izin Undian Gratis Berhadah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Penyerahan Izin Undian Gratis Berhadah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kegiatan Penyelenggaraan Izin Undian Gratis Berhadah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	DAYASOS-04	Kabd Pemberdayaan Sosial	Persyaratan pengajuan tidak dipenuhi	Eksternal	C	Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Sosial P3AP2KB, Penyelenggara Kegiatan	2	3	6		Pembinaan, hibawaun, visitasi dan pendampingan	Kurangnya informasi terkait pelaksanaan kegiatan Undian Gratis Berhadah	Peningkatan frekuensi Sosialisasi terkait pengajuan rekomendasi Penyerahan Izin Undian Gratis Berhadah	Kepala Dinas Dinas Sosial P3AP2KB	9 Bulan		Pendampingan, pengarahar, pembinaan dan visitasi / peninjauan langsung kepada pemohon	Kepala Dinas Dinas Sosial P3AP2KB	Penyelenggara Kegiatan	Maret - Desember	Visitasi / kunjungan langsung	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	April - Desember 2024		
				DAYASOS-05	Kabd Pemberdayaan Sosial	Kurangnya kesadaran tentang pentingnya Izin Undian Gratis Berhadah		C	Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Sosial P3AP2KB, Penyelenggara Kegiatan	2	3	6		Pembinaan, hibawaun, visitasi dan pendampingan	Kurangnya informasi terkait pelaksanaan kegiatan Undian Gratis Berhadah	Peningkatan frekuensi Sosialisasi terkait pengajuan rekomendasi Penyerahan Izin Undian Gratis Berhadah	Kepala Dinas Dinas Sosial P3AP2KB	9 Bulan		Pendampingan, pengarahar, pembinaan dan visitasi / peninjauan langsung kepada pemohon	Kepala Dinas Dinas Sosial P3AP2KB	Penyelenggara Kegiatan	Maret - Desember	Visitasi / kunjungan langsung	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	April - Desember 2024		
				DAYASOS-06	Kabd Pemberdayaan Sosial	Kurangnya kesadaran tentang pentingnya Izin Pengumpulan Uang atau Barang		C	Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Sosial P3AP2KB, Penyelenggara Kegiatan	2	3	6		Pembinaan, hibawaun, visitasi dan pendampingan	Kurangnya keterbukaan penerima manfaat	Peningkatan frekuensi Sosialisasi terkait Pengumpulan Uang atau Barang	Kepala Dinas Dinas Sosial P3AP2KB	9 Bulan		Pendampingan, pengarahar, pembinaan dan visitasi / peninjauan langsung kepada pemohon	Kepala Dinas Dinas Sosial P3AP2KB	Penyelenggara Kegiatan	Maret - Desember	Visitasi / kunjungan langsung	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	April - Desember 2024		
				DAYASOS-07	Kabd Pemberdayaan Sosial	Belum adanya PPNS UGB PUB di lingkak Kota		C	Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Sosial P3AP2KB, Penyelenggara Kegiatan	2	3	6		Pembinaan, hibawaun, visitasi dan pendampingan	Kurangnya keterbukaan penerima manfaat	Peningkatan frekuensi Sosialisasi terkait Pengumpulan Uang atau Barang	Kepala Dinas Dinas Sosial P3AP2KB	9 Bulan		Pendampingan, pengarahar, pembinaan dan visitasi / peninjauan langsung kepada pemohon	Kepala Dinas Dinas Sosial P3AP2KB	Penyelenggara Kegiatan	Maret - Desember	Visitasi / kunjungan langsung	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	April - Desember 2024		
PROGRAM REHABILITASI																													
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan																											
	Persediaan Pemakanan (BPNTD)	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan pemakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/Kota	1. Realisasi anggaran tidak sesuai dengan proyeksi awal	REHSOS-01	Kabd Rehlinjamos	Adanya perubahan peraturan walikota	Internal	C	1. SILPA Anggaran 2. Penerima manfaat tidak dapat menerima bantuan sesuai dengan angka waktu yang semestinya	Penerima bantuan	3	3	9	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penerima manfaat tidak dapat tersampaikan dikarenakan keterlambatan realisasi	Menyusun Perubahan Peraturan Walikota	1. Melakukan koordinasi dengan bagian hukum untuk penyusunan regulasi (peraturan walikota) 2. Melakukan koordinasi dengan TKS dan pemangku wilayah perihal data usulan calon penerima manfaat agar membantu percepatan proses realisasi saat regulasi telah siap	Finalisasi regulasi dan penyusunan jadwal realisasi secepatnya mungkin	Bidang Rehlinjamos	TW III		Melakukan rapat koordinasi dan konsultasi secara berkala dengan bagian hukum perihal penyusunan regulasi (Peraturan Walikota)	Bidang rehlinjamos	Masyarakat	Agustus - Desember 2024	Pemantauan secara langsung dan melalui petugas lapangan (TKS)	Bidang Rehlinjamos	Agustus - Desember 2024		
	Persediaan Pemakanan (RANTANG KASHI)	1. Keterlambatan waktu pemberian	REHSOS-02	Kabd Rehlinjamos	1. Kurir kesulitan mencari lokasi tempat tinggal penerima	Eksternal	C	1. Pemenuhan kebutuhan makanan bagi penerima manfaat tidak terpenuhi	Penerima bantuan	2	3	6	Kebutuhan makanan penerima manfaat tidak dapat diterima	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan secara berkala	Melakukan monitoring melalui petugas di lapangan (TKS) untuk memastikan penerima manfaat telah menerima pemakanan setiap hari	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi dengan penyedia agar kurir melakukan orientasi lapangan sebelum pekerjaan dimulai	Bidang Rehlinjamos dan penyedia	TW I - IV		Rapat koordinasi dan evaluasi	Bidang rehlinjamos	Masyarakat	TW I - IV	Pemantauan secara langsung dan melalui petugas lapangan (TKS)	Bidang Rehlinjamos	TW I - IV			
		2. Realisasi pemberian bantuan tidak sesuai target	REHSOS-03	Kabd Rehlinjamos	2. Penerima yang telah ditetapkan melalui SK Walikota dinyatakan meninggal dunia dan/atau pindah alamat sebelum	Eksternal	C	2. Terjadinya SILPA	Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang	3	2	6	Terjadinya SILPA anggaran akibat tidak dapat terserap sesuai proyeksi awal	Pengantalan SK penerima	Menyiapkan data pengganti dan melakukan perubahan SK secara berkala	Melakukan pengantalan penerima melalui ketetapan Walikota secara berkala	Bidang Rehlinjamos	TW I - IV		Rapat koordinasi bersama TKS dan bagian hukum	Bidang rehlinjamos	Masyarakat	TW I - IV	Pemantauan secara langsung dan melalui petugas lapangan (TKS)	Bidang Rehlinjamos	TW I - IV			
		3. Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak	REHSOS-04	Kabd Rehlinjamos	3. Pengawasan pelaksanaan kontrak kurang memadai	Internal	C	Masyarakat penerima manfaat tidak terlayani	Dinas Sosial P3AP2KB dan Penerima Manfaat	2	3	6	Kuantitas dan kualitas makanan tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan	Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan	1. Melakukan monitoring dapur penyedia secara berkala 2. Melakukan koordinasi dengan TKS untuk melakukan monitoring terhadap kualitas dan kuantitas di lapangan	Menyusun kontrak dengan ritg	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi dengan penyedia agar kurir melakukan orientasi lapangan sebelum pekerjaan dimulai	Bidang rehlinjamos	TW I - IV		Rapat koordinasi dan evaluasi bersama TKS dan penyedia	Bidang rehlinjamos	Penyedia	TW I - IV	Pemantauan secara langsung dan melalui petugas lapangan (TKS)	Bidang Rehlinjamos	TW I - IV		
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA																												
	Persediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan pemakanan sesuai standar Gizi minimal kewenangan Kabupaten/Kota	Realisasi tidak sesuai dengan target	DAYASOS-08	Dinas Sosial P3AP2KB; Penerima manfaat	Perubahan identitas (Penerima manfaat meninggal dunia, pindah alamat, dnyatakan mampu)	Eksternal	C	Target kinerja tidak terpenuhi	Dinas Sosial P3AP2KB, Penerima manfaat	1	2	2		monitoring dan evaluasi kegiatan	pemutahiran data tidak diperbaharui	Pembinaan dan pengaraharn kepada penerima manfaat	Kepala Dinas Dinas Sosial P3AP2KB	9 Bulan		Pendampingan, pengarahar, pembinaan dan visitasi / peninjauan langsung kepada penerima manfaat	Kepala Dinas Dinas Sosial P3AP2KB	Penerima manfaat	Maret - Desember	Sosialisasi kepada penerima manfaat	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	April - Desember 2024		
				DAYASOS-09	Dinas Sosial P3AP2KB; Penerima manfaat	Infiasi ekonomi	Eksternal	C	Jumlah komoditi yang diterima tidak sesuai dengan perencanaan awal	Dinas Sosial P3AP2KB, Penerima manfaat	2	2	4		monitoring dan evaluasi kegiatan	Kondisi ekonomi tidak dapat diprediksi	Pembinaan dan pengaraharn kepada penerima manfaat	Kepala Dinas Dinas Sosial P3AP2KB	9 Bulan		Pendampingan, pengarahar, pembinaan dan visitasi / peninjauan langsung kepada penerima manfaat	Kepala Dinas Dinas Sosial P3AP2KB	Penerima manfaat	Maret - Desember	Sosialisasi kepada penerima manfaat	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	April - Desember 2024		
				DAYASOS-10	Dinas Sosial P3AP2KB; Penerima manfaat	Keterbatasan anggaran	Eksternal	C	Jumlah intervensi program belum mencapai target	Dinas Sosial P3AP2KB, Penerima manfaat	2	2	4		monitoring dan evaluasi kegiatan	Kondisi ekonomi tidak dapat diprediksi	Pembinaan dan pengaraharn kepada penerima manfaat	Kepala Dinas Dinas Sosial P3AP2KB	9 Bulan		Pendampingan, pengarahar, pembinaan dan visitasi / peninjauan langsung kepada penerima manfaat	Kepala Dinas Dinas Sosial P3AP2KB	Penerima manfaat	Maret - Desember	Sosialisasi kepada penerima manfaat	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	April - Desember 2024		
PROGRAM PERLINDUNGAN																													
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Capaian Daerah	Jumlah data fakir miskin yang tervalidasi																											
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	Pemadanan data tidak tepat waktu	REHSOS-05	Kabd Rehlinjamos	Data dari Disaker dan Verifikasi oleh kekarahan	Eksternal	C	Jika data tidak segera dipadankan sehingga mengganggu jumlah bulan penerimaan	Buruh parkir dan masyarakat lainnya	3	2	6	Data yang diterima perlu dipadankan koordinasi dengan tm verifikasi dan validasi	Menyusun timeline kegiatan dan intensi melakukan koordinasi dengan tm verifikasi dan validasi	Perubahan data calon penerima bantuan	Menentukan cut off data calon penerima yang mengalami perubahan, sehingga data calon penerima tidak dapat diganti dengan usulan baru	Kepala Bidang Rehlinjamos	1 hari		Surat	Dispendukcapil dan Dinas P3AP2KB	Dinaker	Oktober	monitoring dan evaluasi	Kabd Rehlinjamos	November-Desember		
PROGRAM PERLINDUNGAN																													
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani																											
	Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup	Kegiatan sosialisasi maupun bimtek terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan belum optimal	PPA-01	Kabd PPA	Kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan bimtek yang ditetapkan	Internal	C	pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan belum optimal	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial P3AP2KB	1	1	1	1	kegiatan sosialisasi dan bimtek dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan belum optimal	penyusunan RKA sesuai dengan anggaran yang ditetapkan	belum sepenuhnya mengkomondr kebutuhan dan anggaran kegiatan sosialisasi dan bimtek berdasarkan kebutuhan di lapangan dan sesuai target kinerja yang direncanakan	bidang perlindungan dan anak Dinas Sosial P3AP2KB	tahun anggaran berjalan (Agustus-Desember)	1 dokumen	BAPPEDA, Perencanaan Sekretariat Dinas Sosial P3AP2KB	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial P3AP2KB	4 bulan	dokumen RKA	Dinas Sosial P3AP2KB	1 bulan			
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan keterlambatan pihak eksternal misal : visum dari RSSA, Pelapor oleh Polres Malang Kota, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Dispendukcapil, Dinkes.)	Rentang waktu untuk terminasi kasus tidak bisa ditentukan karena penangan tahapan oleh petugas terahdi d dalam unit pelayanan terpadu	PPA-02	Kabd PPA	Tahapan penanganan kasus yang memerlukan keterlambatan pihak eksternal misal : visum dari RSSA, Pelapor oleh Polres Malang Kota, proses peradilan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama,	Eksternal	C	Terminasi kasus membutuhkan waktu yang lama	UPT PPA	1	2	2	2	Waktu terminasi kasus lama sehingga Pelapor komplek	Koordinasi dengan pihak eksternal untuk mendorong percepatan tahapan intervensi penanganan kasus	Mapping tahapan penanganan kasus yang melibatkan pihak eksternal destinasi waktu yang diperlukan dengan memahami Pelapor	Mendorong pihak eksternal mempercepat intervensi penanganan kasus sekaligus mengedukasi serta memahami Pelapor	UPT PPA	3 bulan	Lisan dan Tertulis	UPT PPA	Pihak eksternal, Pelapor	3 bulan	Perjncakaan, koordinasi	BIDANG PPA	3 bulan		

No	Program / Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab			CUC	Analisis Risiko				Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	Skala Kemungkinan	Skala Dampak*)	Skala Risiko												
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
			Keamanan petugas saat penjangkauan karena menghadapi Terlapor yang tidak terima atas kedatangan petugas	PPA-03	Kabid PPA	Pada saat penjangkauan ke lokasi drumgukiran petugas menghadapi resiko penerimaan dari Terlapor yang kondisi emosionalnya tidak dapat diprediksi karena	Eksternal	C	Tahapan penanganan kasus terhambat atau tidak terpenuhi	UPT PPA	1	2	2	2	2	2	2	3 bulan	Lisan dan Tertulis	UPT PPA	Terlapor	3 bulan	Penjangkauan, koordinasi	BIDANG PPA	3 bulan
	PROGRAM PERLINDUNGAN																								
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para	Jumlah dokumen hasil koordinasi non sinkronisasi																							
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Kegiatan sosialisasi maupun bimtek terkait pencegahan kekerasan terhadap anak kurang optimal	PPA-04	Kabid PPA	Kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan bimtek yang ditetapkan	Internal	C	pencegahan kasus kekerasan terhadap anak belum optimal	Dinas Sosial P3AP2KB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	PROGRAM PEMULIHAN HAK																								
	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah, dan																								
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	Capaian penilaian evaluasi Kota Layak Anak belum maksimal	PPA-05	Kabid PPA	Kurang optimalnya data yang menjadi indikator dipaparkan dalam aplikasi penilaian Kota Layak Anak	Internal	C	Capaian penilaian Kota Layak Anak tidak mendapatkan predikat Utama	Dinas Sosial P3AP2KB	1	1	1	1	1	1	1	6 bulan	Dokumen, surat menyurat	BAPPEDA, Dinas Sosial P3AP2KB	Bidang Perindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial P3AP2KB	4 bulan	dokumen RKA	Dinas Sosial P3AP2KB	1 bulan
	PROGRAM PERLINDUNGAN																								
	Pelayanan Layanan Kerasan yang Merugikan Perempuan Khususnya Perempuan dalam unit pelayanan terpadu	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh pemeluk terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Rekening waktu untuk penanganan kasus tidak bisa didapatkan karena menunggu tahapan dari pihak eksternal (RSSA, Polres Malang Kota, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Dispendukcapil, Dinkes.)	PPA-06	Kabid PPA	Tahapan penanganan kasus yang memerlukan keterlibatan pihak eksternal misal : visum dan RSSA penanganan pelapor oleh Polres Malang Kota, proses persidangan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama,	Eksternal	C	Terminasi kasus membutuhkan waktu yang lama	UPT PPA	1	2	2	2	2	2	3 bulan	Lisan dan Tertulis	UPT PPA	Pihak eksternal, Pelapor	3 bulan	Penjangkauan, koordinasi	BIDANG PPA	3 bulan	
	PROGRAM PERLINDUNGAN																								
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kabupaten/Kota	Keamanan petugas saat penjangkauan karena menghadapi Terlapor yang tidak terima atas kedatangan petugas	Pada saat penjangkauan ke lokasi drumgukiran petugas menghadapi resiko penerimaan dari Terlapor yang kondisi emosionalnya tidak dapat diprediksi karena	PPA-07	Kabid PPA		Eksternal	C	Tahapan penanganan kasus terhambat atau tidak terpenuhi	UPT PPA	1	2	2	2	2	2	3 bulan	Lisan dan Tertulis	UPT PPA	Terlapor	3 bulan	Penjangkauan, koordinasi	BIDANG PPA	3 bulan	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN																								
	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Jumlah focal point PUG																							
	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Kurangnya pemahaman rencana anggaran dan belanja perangkat daerah belum semua yang memahami ARG	PP-01	Kabid PP	Pada perangkat daerah personal penyusunan rencana anggaran dan belanja perangkat daerah belum semua yang memahami ARG	Internal	C	Belum semua Perangkat Daerah membuat program dan kegiatan tentang Responsif Gender	Seluruh OPD di Pemerintah Kota Malang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah organisasi wanita yang terfasilitasi																							
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Kurangnya pelatihan untuk meningkatkan sumberdaya manusia bagi perempuan di kota malang melalui organisasi perempuan yang ada di kota malang	PP-02	Kabid PP	Kurangnya wawasan pengetahuan dan keterampilan kepada anggota gerakan organisasi wanita	Internal	C	Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang organisasi wanita sebagai wadah partisipasi perempuan	Organisasi Wanita dan Dinas Sosial P3AP2KB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Personil Kewenangan Perempuan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Personil Kewenangan Perempuan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kurangnya perempuan yang mandiri dan berwawasan luas	PP-03	Kabid PP	Masih rendahnya kemandirian dan wawasan luas perempuan yang bergantung kepada laki-laki.	Internal	C	Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peran Dharma Wanita Persatuan Kota Malang	DWP Kota Malang, Dinas Sosial P3AP2KB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	PROGRAM PEMINGKATAN																								
	Kegiatan Peningkatan Kualitas dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah	Jumlah ibu rumah tangga yang mendapatkan pelatihan																							
	Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Perempuan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Perempuan Kabupaten/Kota	-Belum terfasilitasinya seluruh Perempuan Keluarga yang mendapat Pelatihan - Kurangnya pengetahuan perempuan tentang keterampilan	PP-04	Kabid PP	- Kurangnya dukungan anggaran - Waktu pelaksanaan pelatihan terbatas	Internal	C	Kurangnya tenaga perempuan yang terampil	Masyarakat dan Dinsos P3AP2KB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Kabupaten Malang, 20 Agustus 2024
 KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PENGENDALIAN PENYUDUK DAN BUDAYA BERKEMAMUHAN
 SONY SANDITO W.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 1977024 198602